



BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan kinerja pada laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021, Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2016 yang dituangkan melalui Peraturan Bupati Bima Nomor 444 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016.

Untuk memperkuat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bima, maka dilakukan kegiatan



review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021, yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintahan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat dan pendampingan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan review RPJMD Kabupaten Bima antara lain :

1. Mempertajam misi pemerintah Kabupaten Bima.
2. Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas dan fungsi.
3. Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
4. Penambahan beberapa indikator
5. Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
6. Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing – masing pejabat struktural dengan penghitungan bobot dari masing – masing capaian kinerja.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Pemerintah Kabupaten Bima sebelum dan setelah review sebagai berikut :

2.2. Visi dan Misi Kabupaten Bima

Visi dan Misi ini dibuat sebagai pedoman dalam penetapan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Adapun visi pemerintah Kabupaten Bima tahun 2016 - 2021 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal.”**

Visi ini merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangka



memacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dengan upaya optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagaimana dituangkan dalam pernyataan visi sebagai berikut :

1. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Religius** : Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah SWT, Serta Membangun Karakter Religius Dalam Bermasyarakat
2. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Aman** : Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah dan Masyarakat, Mengamankan Proses dan Hasil Pembangunan, Serta Penegakkan Supremasi Hukum
3. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur** : Terbangunnya Ekonomi Yang Tangguh, Kreatif Dan Kompetitif, Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
4. **Pembangunan Kabupaten Bima Yang Amanah** : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam mewujudkan "good governance."
5. **Pembangunan Kabupaten Bima yang Handal** : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya saing dan andal *dalam era global*"

Visi pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan (**sebelum review**), yakni:

1. Membangun pemerintah dan masyarakat yang mengedepankan nilai religius;
2. Membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat, mengamankan proses dan hasil pembangunan serta penegakkan supremasi hukum;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sarana prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan lapangan



- kerja serta peningkatan ekonomi kreatif;
4. Mewujudkan reformasi birokrasi yg jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
 5. Membangun SDM yang handal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan guna mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing.

Setelah dilakukan review, maka misi yang diemban oleh pemerintah Kabupaten Bima adalah :

1. Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat;
2. Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Tertib Dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum;
3. Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
5. Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing.

2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu



sebanyak 32 (tigapuluh dua) tujuan menjadi 10 (sepuluh) tujuan setelah dilakukan review.

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 **sebanyak 126 (seratus duapuluh enam) menjadi 26 (duapuluh enam) sasaran strategis setelah dilakukan Review.**

Hasil review pada RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran.

Misi, tujuan, sasaran berikut indicator dan target Pemerintah Kabupaten Bima **sebelum review** sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal”

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
MISI 1 : Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dalam rangka membangun masyarakat yang bertaqwa dan berbudaya	Meningkatnya efektifitas penyadaran dan pemahaman kehidupan beragama	Tersedianya sistem pembinaan keagamaan yang terintegrasi dan optimal
		Tersedianya Sarpras Peribadatan yang memadai
		Tersedianya Sarpras pendidikan agama yang memadai
		Tersedianya tenaga pembina dan penyuluh agama yang memadai
		Pembinaan Syiar Agama
		Terlaksananya pelayanan Zakat, Infak Shadaqah (ZIS) yang profesional
Meningkatnya intensitas dan efektifitas pembinaan dan	Terbangunnya sarpras kemasyarakatan	



MISI	TUJUAN	SASARAN	
1	2	3	
	penyuluhan kehidupan bermasyarakat	Tersedianya Sarana pembinaan yang memadai Tersedianya tenaga/kader pembangunan kebangsaan yang memadai Terwujudnya keamanan lingkungan yang kondusif Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama	
Misi II : Membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum dalam rangka mewujudkan daerah dan pemerintahan yang kuat dan stabil	Meningkatkan intensitas dan efektifitas penertiban masyarakat	Tersedianya sarpras keamanan dan ketertiban Tersedianya aparat trantib yang memadai dan bertanggungjawab Terkendalinya gangguan ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	
	Meningkatkan intensitas dan efektifitas perlindungan masyarakat dan penegakan hukum	Terpeliharanya harmoni sosial dan kesatuan bangsa dalam masyarakat Tersedianya Sarpras perlindungan masyarakat Tersedianya aparat linmas yang memadai dan bertanggungjawab	
	Meningkatnya kuantitas masyarakat dalam berdemokrasi	Berkembangnya kelembagaan serta proses dan mekanisme demokrasi dan politik yang sehat dan fungsional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara	
	Meningkatnya Legalitas pemanfaatan Potensi SDA	Terpetakannya Sumber daya Alam secara menyeluruh	
	MISI III : Meningkatkan kemajuan dan	Menurunnya kemiskinan	Terbentuknya pelaksana penanganan penanggulangan kemiskinan yang berkualitas



MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatnya ketersediaan lapangan Kerja	Terdatanya penduduk miskin
		Meningkatnya Angkatan kerja produktif
	Meningkatnya Investasi, produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi daerah	Meningkatnya Wirausaha baru (WUB) potensial dan UMKM yang andal
		Termanfaatkan sumberdaya Alam dan SDM secara maksimal
	Meningkatnya Penerimaan keuangan daerah	Terwujudnya peningkatan Investasi didaerah
		Terwujudnya sistim, SDM dan informasi yang memberi kemudahan layanan perijinan dan berinvestasi
	Meningkatnya Penerimaan keuangan daerah	Terlatihnya Pelaku usaha industri, UMKM dan Koperasi
		Terjalinnya kemitraan UMKM dan Sektor perbankan
	Meningkatnya Penerimaan keuangan daerah	Tersedianya sarana pproduksi, promosi dan pemasaran usaha kecil dan UMKM
		Terwujudnya IKM berbasis bahan baku local
Meningkatnya Penerimaan keuangan daerah	Tersedianya produk lokal siap konsumsi	
	Tersosialisasikannya penggunaan produk local	
Meningkatnya Penerimaan keuangan daerah	Terencananya Sumber dan Potensi penerimaan keuangan daerah yang optimal	



MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
		Teridentifikasi potensi-potensi daerah yang mampu meningkatkan PAD
		Terbinanya lembaga dan SDM yang baik
		Tercapainya penerimaan daerah yang optimal
		Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif
	Meningkatnya kualitas Infrastruktur aksesibilitas secara bertahap dan berkelanjutan	Terbinannya SDM Perencana Infrastruktur yang andal
		Tersedianya jalan dan jembatan yang mantap
		Meningkatkan Sarana Perhubungan dan transportasi dengan kondisi baik
		Terpeliharanya Sarana dan Prasana pemerintah dan masyarakat
	Meningkatnya kapasitas dan layanan sarana Irigasi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)	Tersedianya sarana irigasi yang memadai
		Terkelolanya Irigasi yang berkelanjutan
		Terbentuknya Lembaga petani yang handal
		Terpeliharanya kondisi daerah aliran sungai secara berkelanjutan
		Terbinanya masyarakat di bantaran sungai secara berkelanjutan
	Meningkatnya sinergisitas pengembangan kawasan strategis	Berkembangnya Ibukota kabupaten
		Berkembangnya pembangunan terpadu kawasan cepat tumbuh



MISI	TUJUAN	SASARAN	
1	2	3	
	Menurunnya kuantitas Kawasan Kumuh	Terkoneksinya aksesibilitas antar kawasan budidaya	
		Tersedianya rumah yang layak bagi masyarakat	
		tertatanya kawasan Kumuh Perkotaan dan Perdesaan secara berkelanjutan	
		Terbinanya masyarakat di kawasan kumuh	
		Terbentuknya lembaga pengelolaan perumahan dan Persampahan Daerah (SKPD)	
		Tercapainya layanan air bersih desa dan perkotaan yang cukup	
		Terwujudnya layanan sanitasi yang optimal	
		Tersedianya sistem pengelolaan persampahan yang komprehensif	
	Meningkatnya aminitas pengguna Sarana Perhubungan		Peningkatan pelayanan prasarana sanitasi, perumahan dan permukiman masyarakat
			Terwujudnya Sarana Perhubungan darat yang memadai
			Terwujudnya Sarana Perhubungan laut yang memadai
	Meningkatnya aksesibilitas pengguna Sarana Telekomunikasi dan informasi		Tersedianya SDM aparatur yang profesional
			Terwujudnya sarana telekomunikasi yang memadai
			Terbinanya masyarakat pengguna teknologi Informasi



MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
	Meningkatnya kapasitas Pengelolaan dan pemanfaatan Tata Ruang	Tercapainya aparatur Perencana, pelaksana, dan pengendali penataan ruang
		Perbaikan pola perencanaan dan pengendalian tata ruang
		Peningkatan jumlah RTH dan hutan lindung
		Terwujudnya lembaga dan masyarakat yang taat penggunaan ruang
		Terkelolanya aset milik daerah secara tertib sesuai prosedur
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan.	Terpeliharanya kelestarian hutan, lahan dan perairan
		terciptanya masyarakat yang sadar hukum
		Lahan kritis dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		terjaganya kualitas air, udara dan tanah
		Tercegah semakin lemahnya penegakan hukum secara menyeluruh
		Terciptanyan Kawasan Perikanan dan Kelautan yang aman dan ramah lingkungan
	Meningkatnya kualitas Pemanfaatan Sumber daya alam dan Energi	Tersedianya kebutuhan listrik masyarakat
		terkelolaanya sumber daya alam secara terpadu dan terkendali
	Meningkatnya produktifitas kawasan tertinggal dan terpencil	Terpenuhinya Prasarana Kawasan Transmigrasi
		Tersediannya sarana dan prasarana kawasan terpencil



MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
	Berkembangnya potensi pariwisata dan kebudayaan	Tersedianya sarana dan sarana yang representative
		Tersedianya data/informasi yang memadai
		Tersedianya lembaga dan SDM Pariwisata yang handal
		Tersedianya Tokoh kebudayaan local
	Meningkatnya Kapasitas dan utilitas perdagangan dan lembaga usaha masyarakat	Tersedianya Sarana Perdagangan yang memadai
		Tersedianya sumberdaya manusia
		Terwujudnya kondisi aman dan tertib
		Terbinanya Koperasi yang andal dan berkualitas
		Terbentuknya Koperasi Syariah yang andal dan berkualitas
		Terpenuhinya pasokan bahan kebutuhan pokok bermutu dan berkualitas
	Meningkatnya produktifitas perikanan, peternakan dan pekerbunan, Kelautan dan pesisir	Tersedianya hasil produksi pertanian yang maksimal
		Tersedianya hasil produksi kelautan dan perikanan yang maksimal
		Terbangunnya Prasarana dan Sarana Pertanian
		Terbangunnya Prasarana dan Sarana kelautan dan perikanan
		Tersedianya sarana dan Prasarana mesin peralatanbagi Industri kecil dan menengah
		tersedianya garam yodium di masyarakat



MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
		Tersediannya SDM Teknisi/Penyuluh pertanian, Kelautan dan Perikanan yang professional
		Tersediannya kecukupan pangan (beras) secara merata
		Terciptanya hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan hasil laut yang tepat guna, dan daya guna
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
		Tercapainya keseimbangan Lahan dengan Tanaman
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan
	Meningkatnya inovasi dan penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan modern	Terciptanya komoditas unggulan yang kompetitif utamanya bidang pertanian dan perikanan
		Terpeliharanya lahan pertanian
		Terpeliharannya Kawasan Perikanan dan Kelautan yang aman dan ramah lingkungan
		Terlaksananya peternakan rakyat yang modern
		Terlaksananya Perikanan rakyat yang modern



MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
MISI IV : Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab dalam mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Meningkatnya efektifitas pelayanan aparatur	Tersedianya aparatur yang profesional yang terampil
		Tersedianya dokumen perencanaan yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	terwujudnya pelayanan yang maksimal
		Terbangunnya sarana dan prasana pemerintahan yang memadai
	Meningkatnya penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana	
	Meningkatnya efektifitas dan intensitas pemerintahan umum	Terwujudnya kualitas dan efektifitas perencanaan pembangunan
		Terwujudnya efektifitas dan aksesibilitas pelaksanaan pembangunan
		Terwujudnya intensitas dan efektifitas pengawasan dan pengendalian pembangunan
	Terwujudnyanya intensitas dan efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	
	Terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	
MISI V: Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan mengedepankan peran serta masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan Pendidikan Masyarakat	Terbangunnya Sarana Prasarana Pendidikan yang memadai
		Tersedianya Tenaga Pendidik dan Pendidikan yang terampil



MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
dalam pembangunan guna mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing		Tersedianya Kurikulum yang sesuai tuntunan
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Sesuai Kebutuhan
		Tersedianya tenaga Medis dan non Medis yang terampil
		Tersedianya SOP
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Sarana Prasarana yang memadai
		Tersedianya Kader/Motifator yang Terampil
		Tersedianya SOP
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Masyarakat Penyandang Masalah Sosial/termarjinalkan	Tersedianya Sarana Prasarana yang memadai
		Tersedianya Kader diarahkan pada aparatur/SDM
		Tersedianya SOP

Misi, tujuan, sasaran berikut indicator dan target Pemerintah Kabupaten Bima **setelah review** ditunjukkan melalui tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Visi : Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal”

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
Misi 1 : Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat			
1.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman kehidupan beragama	1. Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan 2. Terwujudnya	1. Indeks prestasi (Persentase Juara MTQ) 2. Rasio jumlah dai dibagi



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
		peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat	jumlah penduduk
Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Tertib Dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum			
2.	Menciptakan Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat	3. Meningkatnya Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Hukum	3. Cakupan Penegakan Perda
3.	Berkembangnya kehidupan demokrasi dan politik yang sehat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara	4. Meningkatnya kualitas demokrasi dalam masyarakat	4. Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik
4.	Terwujudnya daerah yang tangguh bencana	5. Membangun masyarakat yang Tangguh terhadap bencana	5. Persentase jumlah desa yang memiliki TSBD
Misi 3 : Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
5.	Menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	6. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	6. Persentase penduduk miskin semakin berkurang 7. Persentase Menurunnya angka Pengangguran
6.	Meningkatkan kualitas Sarana dan prasarana wilayah sesuai arahan tata ruang	7. Meningkatnya kepatuhan terhadap arahan tata ruang	8. Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan Perda RTRW
		8. Tersedianya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	9. Persentase pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
		9. Terpenuhinya kebutuhan air irigasi	10. Persentase jaringan irigasi yang terairi
		10. Tertatanya kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	11. Luas kawasan kumuh
		11. Tersedianya sistem pengelolaan persampahan yang komprehensif	12. Jumlah sampah yang dikelola
		12. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	13. Ketaatan terhadap tata ruang



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
		13. Tersedianya aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan umum	14. Cakupan wilayah yang terlayani angkutan umum
		14. Menurunnya angka kecelakaan	15. Angka kecelakaan
		15. Meningkatnya aksesibilitas terhadap sarana telekomunikasi dan informasi	16. Cakupan desa yang terlayani jaringan telekomunikasi
7.	Meningkatnya Investasi, produktivitas dan daya saing usaha kecil dan menengah menuju kemandirian ekonomi daerah	16. Terwujudnya peningkatan Investasi dan nilai produksi di daerah	17. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah
		17. Peningkatan kemampuan fiskal daerah	18. Persentase pertumbuhan nilai produksi daerah
		18. Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM	19. Persentase kontribusi PAD terhadap APBD
		19. Terjaganya ketersediaan dan cadangan pangan	20. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi
			21. Rata-rata cadangan pangan
22. Jumlah produksi kelautan dan perikanan : • Tangkap • Budidaya • Garam			
Misi 4 : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
8.	Meningkatnya kualitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang prima	20. Terciptanya pelayanan publik yang profesional	23. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat yang melakukan survey kepuasan
			24. Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)
		21. Terciptanya sistem birokrasi yang profesional dan berkualitas	25. Level APIP
			26. Opini BPK
			27. Peringkat LPPD
28. Nilai LKIJP			
Misi 5 : Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing			
9.	Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat	22. Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan	29. Angka melek huruf (AMH)
			30. Angka rata-rata lama sekolah
			31. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	2	3	4
			(PAUD)
		23. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	32. Angka usia harapan hidup 33. Prevalensi balita gizi buruk 34. Rasio kematian ibu melahirkan 35. Rasio kematian bayi
		24. Terciptanya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	36. Persentase perempuan bekerja dalam menunjang perekonomian 37. Penyelesaian pengaduan kasus KDRT yang tertangani
		25. Tercapainya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	38. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tertangani. 39. Jumlah desa mandiri
10.	Meningkatnya prestasi masyarakat di bidang olahraga dan seni	26. Terwujudnya pencapaian prestasi olahraga dan seni	40. Peringkat pekan olahraga tingkat Provinsi 41. Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi dan Nasional

2.4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bima ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bima Nomor 12 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan pemerintah Kabupaten Bima.



Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bima

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Review	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Review	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	2	3
1. Panduan/pedoman tentang sistem pembinaan keagamaan yang disusun	1. Indeks prestasi (Persentase Juara MTQ)	Jumlah Prestasi yang diraih ----- x 100 Jumlah Target yang akan diraih
2. Prestasi bidang keagamaan tingkat Kabupaten/Provinsi dan Nasional	2. Rasio jumlah da'i dibagi jumlah penduduk	Data jumlah da'i ditiap desa baik yang sudah/belum mendapat pembinaan dan penyuluhan agama
3. Lembaga keagamaan / sosial yang mendapatkan bantuan	3. Cakupan Penegakan Perda	Jumlah penyelesaian penegakan Perda ----- x 100 Jumlah pelanggaran Perda
4. Rasio sarana dan prasarana pendidikan agama perjumlah penduduk	4. Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik	Jumlah masyarakat yang mengikuti pemungutan suara Pemilu/Pilkada ----- x 100 Jumlah masyarakat yang mempunyai hak memilih dalam Pemilu/Pilkada
5. Jumlah tenaga pembina dan penyuluh agama	5. Persentase jumlah desa yang memiliki TSBD (Tim Siaga Bencana Desa)	Jumlah KK yang terdampak bencana ----- x 100 Jumlah desa terdampak bencana
6. Persentase pembayaran ZIS	6. Persentase penduduk miskin semakin berkurang	Jumlah hasil pengentasan kemiskinan ----- x 100 Jumlah target pengentasan kemiskinan
7. Penduduk Kabupaten Bima yang menunaikan ibadah haji	7. Persentase Menurunnya angka Pengangguran	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan ----- x 100 Jumlah pencari kerja
8. Peserta khataman Al Qur'an	8. Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai	Jumlah kasus yang diselesaikan pemda
9. Konflik antar umat beragama		



Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Review	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Review	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	2	3
	dengan Perda RTRW	----- x 100 jumlah kasus yang ada
10. Pembinaan keagamaan	9. Persentase pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	Panjang jalan/jembatan kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100 % Panjang seluruh jalan/jembatan kabupaten di daerah tersebut
11. Jumlah aparat Pol PP	10. Persentase jaringan irigasi yang terairi	Luas sawah terairi jaringan irigasi teknis -----x 100 % Luas sawah
12. Menurunnya angka kriminalitas, tindak kekerasan/kejahatan	11. Luas kawasan kumuh	Luas lingkungan pemukiman kumuh ----- x 100 Luas wilayah
13. Persentase penegakan peraturan perundangan (Perda/Perbup)	12. Jumlah sampah yang dikelola	Volume sampah yang ditangani ----- x 100 Volume produksi sampah
14. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pilgub, Pemilu dan Pilpres	13. Ketaatan terhadap tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang yang sesuai aturan ----- x 100 jumlah dokumen perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang yang disusun
15. Jumlah LSM atau Ormas yang memenuhi syarat (legal)	14. Cakupan wilayah yang terlayani angkutan umum	Jumlah angkutan umum ----- x 100 % Jumlah wilayah/desa
16. Peta wilayah rawan bencana	15. Cakupan desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	Jumlah Desa Terlayani ----- x 100 % Jumlah wilayah/desa
17. Jumlah Sosialisasi /Simulasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan dalam 1 tahun	16. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah	$\frac{PDRB_{(t+1)} - PDRB_{(t)}}{PDRB_{(t)}} \times 100$ t + 1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya
18. Tingkat pengangguran terbuka	17. Persentase pertumbuhan nilai produksi daerah	$\frac{PDRB \text{ nilai produksi daerah th } n - PDRB \text{ nilai produksi daerah tahun } n-1}{PDRB \text{ nilai produksi daerah tahun } n-1} \times 100$



Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Review	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Review	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	2	3
		PDRB nilai produksi daerah th n-1
19. Penurunan angka kemiskinan	18. Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	Jumlah PAD yang diterima dalam 1 tahun -----x 100% Jumlah total penerimaan APBD
20. Tersedianya tambatan perahu pada setiap ibu kota kecamatan	19. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Jumlah Kontribusi PDRB UMKM ----- x 100 % Jumlah PDRB
21. Penurunan jumlah kecelakaan terjadi dalam 1 Tahun	20. Rata-rata cadangan pangan	Rata-rata jumlah Ketersediaan pangan utama per tahun ----- x 100 Jumlah penduduk
22. Jaringan telekomunikasi SKPD/desa	21. Jumlah produksi kelautan dan perikanan (tangkap/ budidaya/ Garam)	Jumlah produksi ikan tangkap, budidaya dan garam per tahun
23. Website milik pemerintah daerah	22. Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB Pariwisata ----- x 100 % Jumlah PDRB
24. PPID aktif	23. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat yang melakukan survey kepuasan	Jumlah OPD yang melakukan pelayanan dengan baik ----- x 100 % Jumlah OPD pemberi pelayanan langsung
25. Pertumbuhan ekonomi	24. Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD yang sudah menerapkan aspek lingkungan pengendalian unsur-unsur SPIP ----- x 100 % Jumlah SKPD
26. PDRB perkapita harga berlaku	25. Level APIP	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian atas kualitas APIP
27. PDRB perkapita harga konstan	26. Opini BPK	Predikat yang diperoleh dari hasil penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah pada tahun n
28. Jumlah pendapatan asli daerah	27. Peringkat LPPD	Nilai / Peringkat hasil penilaian LPPD pada tahun (n) oleh Tim Kemendagri
29. Peningkatan IPM	28. Nilai LKIJ	Nilai / Predikat hasil evaluasi



Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Review	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Review	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	2	3
		AKIP pada tahun (n) oleh Tim Kemen PAN-RB
30. Prosentase Rumah Layak Huni meningkat	29. Angka melek huruf (AMH)	Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis ----- x 100 Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas
31. Luas kawasan kumuh tertangani	30. Angka rata-rata lama sekolah	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas ----- x 100 Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas
32. Cakupan Rumah tangga terlayani air bersih	31. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak ----- x 100 Jumlah anak usia 4 – 6 tahun
33. Cakupan area Layanan sanitasi	32. Angka usia harapan hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
34. Desa dengan kondisi jalan baik	33. Prevalensi balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
35. Pembangunan Kantor organisasi perangkat daerah Kabupaten Bima	34. Rasio kematian ibu melahirkan	Banyaknya kematian ibu (saat hamil, melahirkan dan nifas) selama tahun tertentu ----- x 100.000 Jumlah saat ibu hamil, melahirkan dan nifas
36. Luas kawasan RTH	35. Rasio kematian bayi	Jumlah kematian bayi ----- x 100 % Jumlah bayi
37. Jumlah lahan kritis tertangani	36. Persentase perempuan bekerja dalam menunjang perekonomian	Jumlah pekerja perempuan ----- x 100 % Jumlah perempuan pencari kerja
38. Persentase penanganan	37. Penyelesaian	Jumlah pengaduan /



Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Review 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Review 2	Penjelasan / Formulasi Perhitungan 3
sampah	pengaduan kasus KDRT yang tertangani	laporan yang ditindaklanjuti ----- x 100 Jumlah pengaduan / laporan yang masuk
39. Jumlah kunjungan wisatawan	38. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tertangani.	Jumlah kelompok binaan -----x100 Jumlah PMKS
40. Jumlah gelar dan misi kesenian	39. Jumlah desa mandiri	Menunjukkan Jumlah Desa yang telah mandiri dalam aspek swasembada
41. Jumlah fasilitas seni dan budaya	40. Peringkat pekan olahraga tingkat Provinsi	Jumlah prestasi yang diraih kontingen Kabupaten Bima
42. Cakupan kelestarian situs dan budaya lokal	41. Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi dan Nasional	Jumlah prestasi olahraga yang dicapai pada tingkat pelajar
43. Peningkatan sarana dan prasarana Pasar		
44. Pertumbuhan IKM binaan baru		
45. Jumlah wira usaha baru		
46. Jumlah koperasi yang berbadan hukum		
47. Jumlah keanggotaan koperasi		
48. Cakupan bina kelompok pedagang / usaha informal		
49. Tingkat produktifitas padi per hektar		
50. Tingkat produksi bahan pangan utama lokal lainnya non padi per hektar		
51. Jumlah populasi ternak sapi		
52. Skor pola pangan harapan		
53. Meningkatnya Stok pangan		
54. Jumlah produksi perikanan Tangkap		
55. Jumlah produksi perikanan budidaya		
56. Jumlah produksi garam		
57. Luas areal budidaya garam		
58. Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan		



Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Review	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Review	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	2	3
daerah		
59. Nilai dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
60. Nilai dan Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
61. Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		
62. Persentase kasus/pengaduan yang ditindaklanjuti		
63. Angka melek huruf (AMH)		
64. Angka rata-rata lama sekolah		
65. Angka partisipasi kasar SD/MI		
66. Angka partisipasi kasar SLTP		
67. Angka partisipasi kasar SLTA		
68. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		
69. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B		
70. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C		
71. Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
72. Angka usia harapan hidup		
73. Cakupan Desa UCI (universal child immunization)		
74. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		
75. Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)		
76. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		
77. Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif		
78. Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk :		
- Dokter/Dokter gigi		
- Bidan		
- Perawat		
79. Persentase penduduk miskin kabupaten bima yang		



Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Review	Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Review	Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1	2	3
berobat gratis melalui Jamkesda		
80. Cakupan desa siaga aktif		
81. Cakupan posyandu aktif		
82. Cakupan peserta KB aktif		
83. Persentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintahan		
84. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan		
86. Jumlah organisasi pemuda		
85. Jumlah kegiatan kepemudaan		
87. Jumlah kegiatan olahraga		
88. Jumlah lapangan olahraga		
89. Jumlah PKK aktif		
93. jumlah kelompok binaan PKK		
90. Persentase kelompok penerima program sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE)		
94. Penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016 mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016 -



2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 dan Perubahannya serta **hasil review**.

Pemerintah Kabupaten Bima telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016 setelah hasil review RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya peningkatan sosial keagamaan	1. Indeks prestasi (Persentase Juara MTQ)	%	40
2.	Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat	2. Rasio jumlah dai dibagi jumlah penduduk	%	0,002
3.	Meningkatnya Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Hukum	3. Cakupan Penegakan Perda	%	65
4.	Meningkatnya kualitas demokrasi dalam masyarakat	4. Persentase partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik	%	70
5.	Membangun masyarakat yang Tangguh terhadap bencana	5. Persentase jumlah desa yang memiliki TSBD	%	40
6.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	6. Persentase penduduk miskin semakin berkurang	%	15,78
		7. Persentase Menurunnya angka Pengangguran	%	4,72
7.	Meningkatnya kepatuhan terhadap arahan tata ruang	8. Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan Perda RTRW	%	46,75
8.	Tersedianya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	9. Persentase pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan	%	34
9.	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi	10. Persentase jaringan irigasi yang terairi	%	43
10.	Tertatanya kawasan kumuh perkotaan dan perdesaan secara berkelanjutan	11. Luas kawasan kumuh	Ha	961.21
11.	Tersedianya sistem	12. Jumlah sampah yang	(Ton/M ³)	0,05



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	pengelolaan persampahan yang komprehensif	dikelola		
12.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang	13. Ketaatan terhadap tata ruang	%	80
13.	Tersedianya aksesibilitas masyarakat terhadap angkutan umum	14. Cakupan wilayah yang terlayani angkutan umum	%	81,68
14.	Menurunnya angka kecelakaan	15. Angka kecelakaan	Kali	96
15.	Meningkatnya aksesibilitas terhadap sarana telekomunikasi dan informasi	16. Cakupan desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	%	80,63
16.	Terwujudnya peningkatan Investasi dan nilai produksi di daerah	17. Persentase Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	5,73
		18. Persentase pertumbuhan nilai produksi daerah	%	3,00
17.	Peningkatan kemampuan fiskal daerah	19. Persentase kontribusi PAD terhadap APBD	%	6,67
18.	Peningkatan kualitas dan kuantitas UMKM	20. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi	%	2,80
19.	Terjaganya ketersediaan dan cadangan pangan	21. Rata-rata cadangan pangan	Ton	65,681
		22. Jumlah produksi kelautan dan perikanan : • Tangkap • Budidaya • Garam	Ton	150.581
			Ton	50.179
20.	Terciptanya pelayanan publik yang profesional	23. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat yang melakukan survey kepuasan	%	0,00
21.	Terciptanya sistem birokrasi yang profesional dan berkualitas	24. Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP)	Level	2
		25. Level Auditor	Level	3
		26. Opini BPK	Opini	WTP
		27. Peringkat LPPD	Peringkat	144
		28. Nilai LKIJP	Nilai	CC
22.	Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan	29. Angka melek huruf (AMH)	%	93,49
		30. Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,36



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
		31. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	60,22
23.	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan	32. Angka usia harapan hidup	Usia	64,86
		33. Prevalensi balita gizi buruk	%	7,29
		34. Rasio kematian ibu melahirkan	%	79,90
		35. Rasio kematian bayi	%	7,80
24.	Terciptanya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	36. Presentase perempuan bekerja dalam menunjang perekonomian	%	8,96
		37. Penyelesaian pengaduan kasus KDRT yang tertangani	Kasus	16
25.	Tercapainya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa	38. Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang tertangani.	%	0,01
		39. Jumlah desa mandiri	Desa	0
26.	Terwujudnya pencapaian prestasi olahraga dan seni	40. Peringkat pekan olahraga tingkat Provinsi	Peringkat	6
		41. Jumlah prestasi olahraga tingkat provinsi dan Nasional	Juara	32